

Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik).



Penulis : Nita Nur Septia
Nim : 1021910044

Dosen pembimbing : Alfiana Fitri, S.A., M.A.
NIP: 9017260

Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Desa, yang di dalamnya terdapat beberapa fokus penting, khususnya Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Di Desa Balongmojo terdapat permasalahan kurangnya pemahaman pentingnya transparansi pengelolaan keuangan dana desa bagi aparatur desa. Banyak masyarakat yang kurang tau tentang pengelolaan dana desa

Hasil dan Pembahasan

1. Dalam proses Perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran pemerintah Desa Balongmojo telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
2. Dalam proses Pelaksanaan setiap penerimaan atau pengeluaran telah dilaksanakan melalui Bank Jatim dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
3. Dalam proses Penatausahaan, Bendahara Desa Balongmojo mencatat setiap penerimaan maupun pengeluaran pada buku kas umum melalui aplikasi SISKEUDES.
4. Dalam proses Pelaporan, pemerintah Desa Balongmojo telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
5. Dalam proses Pertanggungjawaban, pemerintah Desa Balongmojo telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang penulis terima, penulis selanjutnya akan memberikan masukan dan saran untuk pemerintah desa. Pemerintah Desa Balongmojo sebaiknya menerapkan asas transparansi setiap adanya pengeluaran dan pembelian sehingga seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Pemerintah Desa Balongmojo sebaiknya lebih meningkatkan komunikasi menegani realisasi APBDes kepada seluruh masyarakat Desa Balongmojo supaya seluruh masyarakat mengetahui realisasi APBDes.

Rumusan Masalah

- Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018?

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah dengan melalui metode kualitatif.